

Judul : Parlemen Kunci Pembangunan Berkelanjutan
Tanggal : Jumat, 14 September 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4



Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menjadi narasumber dalam forum World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali kemarin.

Parlemen Kunci Pembangunan Berkelanjutan

BALI – Negara-negara berkembang membutuhkan akses yang lebih mudah terhadap teknologi canggih untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan. Untuk memperjuangkan hal itu diperlukan kerjasama berbagai negara.

Demikian salah satu poin yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam pidato penutupan *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* (WPFSD) di Bali kemarin. “Ini adalah pertemuan tahunan kedua Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan. DPR RI merupakan inisiator penyelenggaraan forum ini sekaligus menjadi tuan rumahnya sejak pertama kali forum ini diinisiasi tahun 2017 lalu. Ini tentu saja merupakan sebuah kebanggaan untuk kita. Apalagi forum ini dihadiri delegasi parlemen dari 46 negara,” ujar Fadli Zon.

Dia menjelaskan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan tujuan dari masyarakat dunia untuk menciptakan ekosistem dunia yang lebih baik. Menurutnya Indonesia harus lebih banyak berpe-

ran dalam upaya mewujudkan berbagai indikator SDGs. “Sejak *Sustainable Development Goals* (SDGs) diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2015, SDGs telah menjadi perhatian bersama komunitas dunia. SDGs mencerminkan masa depan dan keberadaan kita. Pencapaian SDGs sangat penting untuk menciptakan dunia yang lebih baik,” katanya.

Politikus Gerindra itu mengatakan peran parlemen dalam mewujudkan SDGs sangat vital. Sebab parlemen merupakan lembaga legislatif yang menghasilkan berbagai aturan perundangan di Tanah Air. Jika semua peraturan perundangan didasari semangat dalam mencapai SDGs, upaya untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik akan lebih mudah. “Itu sebabnya semua orang harus mengetahui dengan baik agenda SDGs. Bahkan setiap orang seharusnya bisa aktif mengambil bagian sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam upaya mewujudkan SDGs. Peran parlemen sebagai pembuat kebijakan (UU) sangat penting untuk mewujudkan target-target SDGs,” ucapnya.

Fadli Zon mengungkapkan dalam WPFSD I/2017 delegasi parlemen dari berbagai negara menyepakati Deklarasi Bali. Di WPFSD kedua tahun ini para delegasi parlemen dari berbagai negara mendeklarasikan *Bali Commitment* yang menyepakati empat hal. *Pertama*, komitmen untuk meningkatkan kesadaran atas SDGs di negara masing-masing, *kedua* membangun mekanisme yang diperlukan bersama pemerintah dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan menyesuaikan dengan *roadmap* SDGs di negeri masing-masing. *Ketiga*, membangun *partnership* antara parlemen dan *development partner* serta *stakeholder* lainnya dalam rangka menyesuaikan hasil-hasil dari konferensi ini di tingkat nasional dan internasional. Dan *keempat*, meminta Indonesia tetap mengambil inisiatif menyelenggarakan forum SDGs secara berkala agar parlemen dunia bisa mengevaluasi pencapaian-pencapaian negara masing-masing. Komitmen ini adalah langkah lanjutan dari Deklarasi Bali 2017,” sebutnya.

● **mula akmal**